

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang selalu diberatkan dengan permasalahan kemiskinan. Menurut Badrul (2002:10) suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara miskin diidentifikasi dengan rendahnya tingkat pendapatan per kapita sedangkan negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (lebih dari 2 persen per tahun). Tipikal negara berkembang yang disandang oleh Indonesia turut mengambil andil sebagai faktor kemiskinan masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia hanya mampu menurunkan persentase kemiskinan sebanyak 2,42% saja (BPS, 2022). Persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 mencapai angka 9,51% dengan jumlah 26,16 juta jiwa (BPS, 2022)

Kondisi kemiskinan di Indonesia terus diupayakan pengentasannya oleh Pemerintah. Pemerintah turut berkontribusi langsung melalui adanya kebijakan bantuan-bantuan sosial. Menurut Kementerian Kominfo (2021) bantuan bantuan sosial yang ada di Indonesia saat ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), & Bantuan Pangan Non Tunai. (Bantuan Pangan Non Tunai). Pemberian bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan dasar fakir miskin yang belum terpenuhi sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 meliputi; pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan perlindungan sosial.

Kebutuhan dasar yang menjadi acuan utama dalam penentuan kemiskinan adalah kebutuhan pangan. Dalam pandangan BPS (Badan Pusat Statistik) garis kemiskinan (GK) diukur dengan tingkat konsumsi atau jumlah rupiah untuk konsumsi setiap orang perbulannya. Bagi keluarga yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pangan akan mengalami kesulitan untuk mencapai jumlah konsumsi kalori minimum sehari-hari. Secara garis besar jumlah standar makan yang dikategorikan cukup adalah sebanyak tiga kali dalam sehari. Jika hanya menyanggupi makan sebanyak satu hingga dua kali saja dalam satu hari, maka keluarga tersebut sudah dapat digolongkan ke dalam kategori kemiskinan menurut kriteria dari Badan Pusat Statistik (2014). Oleh karena itu, kategori ini dapat ditunjang dengan bantuan sembako atau biasa dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai, yang disingkat BPNT, merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai berupa uang elektronik dari pemerintah kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara rutin dalam satu hingga tiga bulan sekali. Bantuan ini hanya dapat digunakan oleh KPM untuk membeli bahan pangan di *e-Warong*. *E-Warong* merupakan Elektronik Warung Gotong Royong yang ditentukan oleh Pemerintah sebagai agen pembelian bahan-bahan pangan yang diperuntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana telah bermitra dengan bank penyalur. Program bantuan sosial pangan merupakan bentuk pengembangan dari program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) yang kemudian pada tahun 2017 bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini diberikan dalam wujud saldo yang didapat

oleh masyarakat penerima manfaat, yang dicairkan satu kali dalam satu hingga tiga bulan dengan besarnya yaitu Rp 200.000/KPM. Saldo hanya dapat ditukar berupa barang sembako yang mana dapat diambil melalui pedagang yang memiliki *e-Warong* terdekat yang telah terdaftar dengan instansi terkait.

Program BPNT merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam menyalurkan berbagai jenis bantuan, Kementerian Sosial membentuk mitra yang dinilai cukup mumpuni dan mengenal karakteristik masyarakat lebih baik. Mitra tersebut adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, PSM memiliki tugas sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSM berkedudukan di desa/kelurahan dalam setiap daerah karena mengingat bahwa PSM tumbuh dengan masyarakat setempat dan sangat memahami karakteristik masyarakatnya (Akbar, 2017:33)

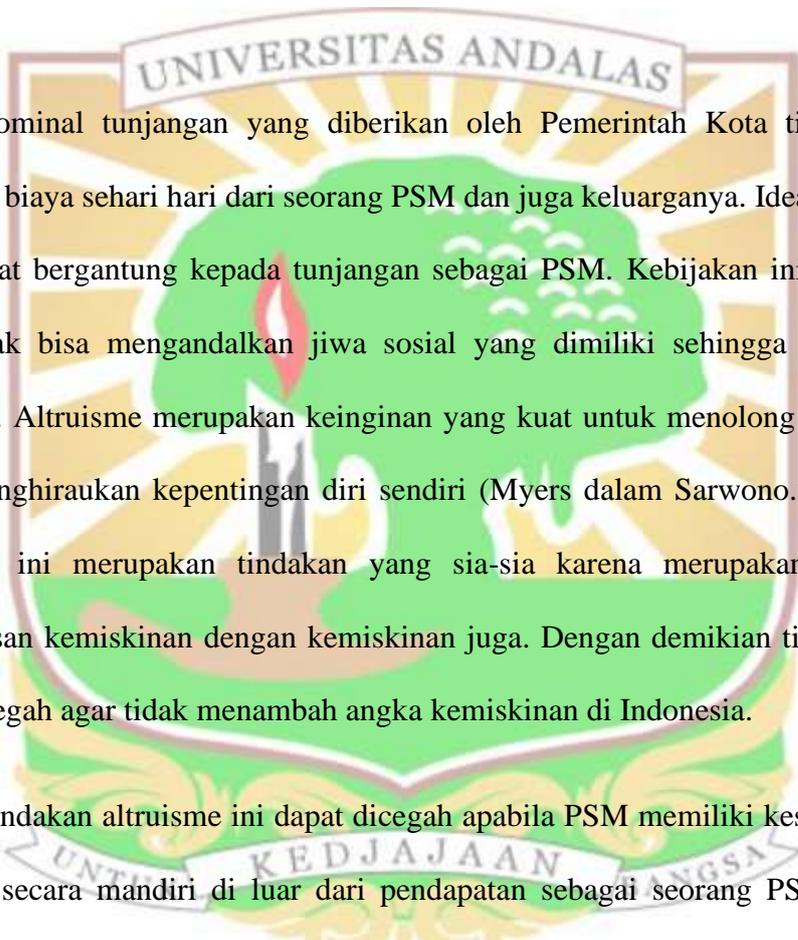
Penguatan kapasitas dari seorang PSM turut dipupuk negara melalui berbagai macam program pemberdayaan, bimbingan teknis, pendidikan serta pelatihan-pelatihan. Kiat-kiat ini ditujukan agar PSM dapat memaksimalkan kemampuan dalam mengemban kewajiban dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. Keberhasilan PSM dinilai dari kinerja dan perilaku PSM dalam berkontribusi membangun kesejahteraan sosial. Mandat utama PSM adalah memberikan pelayanan sosial kepada setiap tataran yang dimulai dari individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat yang membutuhkannya yang disesuaikan

dengan nilai-nilai (*value*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan profesional (*professional skill*) dalam ranah pekerjaan sosial (Taufikurrokhman, 2021:15).

Penguatan kapasitas PSM dilakukan dengan dasar harapan yang tinggi dari pemerintah terhadap posisi strategis PSM dalam menyelenggarakan pengentasan kemiskinan. PSM dalam ruang lingkup penyaluran BPNT diberi tanggung jawab dalam bidang administrasi mulai dari pendataan masyarakat miskin untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pengajuan atau rekomendasi kandidat pada Musyawarah tingkat Kelurahan (Muskel) penerima bantuan sosial (Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 2017) hingga menangani permasalahan dalam penyaluran BPNT sesuai dengan fungsi PSM sebagai fasilitator. Kemudian PSM juga merancang program peningkatan ekonomi KPM, menciptakan kemudahan akses-akses dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari hari, menjalin kemitraan dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki nilai dan tujuan sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2009:21).

Tugas pokok dan fungsi yang ditanggung oleh PSM memiliki beban yang relatif berat karena harus mengorbankan waktu dan juga tenaga dalam melayani masyarakat. Sedangkan, pada faktanya PSM hanya merupakan mitra yang bekerja secara sukarela yang bermodalkan jiwa sosial yang tinggi mengabdikan untuk masyarakat (PERMENSOS, 2019). PSM tergolong sebagai relawan sosial dengan populasi terbanyak tanpa remunerasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI. (Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial 2020). Keputusan pemerintah pusat untuk tidak memberikan tunjangan kepada PSM memicu terciptanya turunan

kebijakan dari pemerintah kota. Seperti yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 tahun 2020 pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa honor yang diberikan kepada PSM berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Nominal dari honor tersebut hanya berkisar dari Rp 100.000 – Rp 500.000/bulannya menyesuaikan dengan kapasitas APBD pada masing-masing daerah.



Nominal tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota tidak dapat menutupi biaya sehari-hari dari seorang PSM dan juga keluarganya. Idealnya PSM tidak dapat bergantung kepada tunjangan sebagai PSM. Kebijakan ini menuntut PSM tidak bisa mengandalkan jiwa sosial yang dimiliki sehingga cenderung altruisme. Altruisme merupakan keinginan yang kuat untuk menolong orang lain tanpa menghiraukan kepentingan diri sendiri (Myers dalam Sarwono.2002:328). Tindakan ini merupakan tindakan yang sia-sia karena merupakan tindakan pengentasan kemiskinan dengan kemiskinan juga. Dengan demikian tindakan ini harus dicegah agar tidak menambah angka kemiskinan di Indonesia.

Tindakan altruisme ini dapat dicegah apabila PSM memiliki kesejahteraan ekonomi secara mandiri di luar dari pendapatan sebagai seorang PSM. Sesuai dengan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2012 yang mengharuskan PSM memiliki sumber penghidupan yang memadai. Namun, pada tahun 2019 peraturan tersebut direvisi dengan menghapuskan kategori kemampuan dari seorang PSM sebagai syarat sebagai PSM. Keputusan ini menjadi salah satu penyebab banyaknya PSM yang juga merupakan KPM secara bersamaan.

Keputusan menghapuskan syarat kemapanan PSM tidak diiringi dengan peningkatan nominal honor yang diterima oleh PSM sehingga timbul berbagai macam kesenjangan karena PSM yang merangkap sebagai KPM dihadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. PSM yang diharapkan dapat menjadi penyelenggara pengentasan kemiskinan ternyata juga merupakan individu yang harus dibantu untuk bebas dari kemiskinan. Kesenjangan ini turut menjadi stimulus yang menuai respons PSM yang diwujudkan melalui tindakan. Respons yang berbeda-beda dapat dilihat pada tindakan PSM dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tindakan yang berusaha menghindari sikap altruisme secara berlebihan dapat berakibat pada terbentuknya sikap egoisme yang mementingkan kebutuhan pribadi secara berlebihan. Misalnya di Kota Payakumbuh terdapat perilaku PSM yang menimbulkan kemarahan warga di Kelurahan Padang Tinggi Piliang (PTP) seperti yang dikutip dalam laman dekadepos.com :

“Penggantian ini keinginan masyarakat, sebab kami menilai pekerja sosial tidak bekerja secara transparan, terutama terkait pendataan bagi mereka yang berhak menerima bantuan karena terdampak Covid-19,” ucap Rosnimar diamini Dalsisup dan sejumlah perwakilan RT dan RW lainnya. (dst.)” (dekadepos.com, 11 Desember 2022, 15.03 WIB)

Transparansi dalam penyaluran bantuan sosial merupakan permasalahan yang cukup krusial seperti dalam penelitian (Eva, dkk. 2021) bahwa banyak aparat dan petugas yang sengaja memasukkan keluarganya atau kerabatnya yang sebenarnya tidak dapat dikategorikan miskin. Berdasarkan observasi pra-penelitian ditemukan bahwa keluarga atau kerabat yang dimasukkan tersebut biasanya tinggal bersama PSM dalam rumah yang sama. Sehingga sembako yang didapatkan dari

BPNT juga dapat dirasakan manfaatnya oleh PSM yang terkendala dalam pemenuhan kebutuhan kalori minimum sehari hari.

Selain itu, berdasarkan observasi awal peneliti di Kota Payakumbuh terdapat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapatkan sembako baru yang masih sesuai standar kemudian menjual kembali sembako tersebut kepada pihak lain. Hasil penjualan tersebut ditukarkan dengan uang tunai yang nantinya akan dibagi dengan PSM. Uang tunai tersebut diberikan dengan alasan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada PSM yang turut membantu memberikan informasi penyaluran bantuan secara aktual. Jika informasi tersebut lambat diterima, maka sembako yang didapatkan adalah sembako yang sudah rusak bahkan tidak layak konsumsi sehingga tidak bisa mereka jual kembali.

Kecurangan-kecurangan dari PSM timbul akibat setiap proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial kultural yang berbeda pula dalam setiap masyarakat (Marzali, 2009:76). Perbedaan dalam faktor sosiokultural ini akan menyebabkan perbedaan perilaku Individu PSM dalam praktik penyaluran bantuan sosial. Hal ini dikarenakan dalam terdapat faktor kebudayaan (*culture*) yang menjadi pedoman PSM dalam berperilaku. Tak hanya itu, terdapat juga pengaruh struktur sosial seperti pola hubungan sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi subjektifitas seorang PSM dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan motor penggerak dari proses pembangunan yang memiliki fungsi dan peran strategis dalam menanggulangi

kemiskinan melalui pengelolaan bantuan pemerintah di tingkat kelurahan atau desa. Perilaku PSM yang tidak sesuai dengan kaidah tuntunan idealnya seorang pekerja sosial akan menyulitkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata. Sementara PSM juga harus memenuhi kebutuhan dirinya. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis problematika sehingga dapat mengungkap perilaku yang dihasilkan PSM dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

B. Rumusan Masalah

Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai agen mitra pemerintah yang bersifat sukarelawan dan memiliki posisi strategis dalam menanggulangi kemiskinan. Status sukarelawan (*volunteer*) oleh PSM hanya memiliki upah pengganti transportasi dengan nominal yang berkisar dari Rp 100.000 hingga Rp 500.000 saja. Jumlah tersebut tentunya tidak mampu menutupi biaya biaya kebutuhan dasar PSM. Dengan demikian hendaknya PSM memiliki penghasilan lain yang dapat mencukupi biaya hidupnya.

Revisi dari Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 tahun 2012 yang diperbaharui menjadi Peraturan Kementerian Sosial Nomor 10 tahun 2019, terdapat penghapusan pada regulasi persyaratan menjadi seorang PSM. Persyaratan yang dihapus adalah keharusan seorang PSM memiliki sumber penghidupan yang memadai. Penghapusan regulasi ini berakibat pada kebebasan seseorang dalam mencalonkan diri sebagai PSM sehingga seringkali ditemukan PSM yang merangkap sebagai KPM, PSM tidak mempunyai kendaraan penunjang mobilisasi

bahkan PSM tidak memiliki *smartphone* untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang diseminasi informasi kepada KPM.

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh seorang PSM ternyata tidak mematahkan motivasi seorang PSM untuk senantiasa berusaha melaksanakan tanggung jawab atas status yang diembannya. Pemaksaan atas pementasan peran dalam situasi kekurangan ini menimbulkan problematika bagi setiap PSM. Problematika yang dialami PSM terbentuk melalui keadaan yang tidak ideal antara sumber penghidupan yang tidak memadai namun rela mengorbankan waktu dan juga tenaganya. Problematika ini ternyata berusaha diatasi PSM melalui berbagai celah celah yang terdapat dalam penyaluran BPNT bahkan diluar tupoksinya sebagai PSM.

Kecacatan regulasi BPNT yang seringkali berubah ubah, berbasis digital padahal memiliki target masyarakat kategori miskin yang notabeneanya minim pengetahuan tentang teknologi serta kelonggaran pengawasan menjadi celah bagi PSM untuk bertindak di luar tupoksi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penyaluran BPNT seperti; PSM yang memegang kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara pribadi tanpa alasan yang logis; rangkap peran menjadi agen *e-warong*; menjualkan bantuan sembako; ketidakmerataan informasi penyaluran; hingga melakukan praktik nepotisme.

Berangkat dari realitas tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana kebijakan dan implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Payakumbuh ?
2. Bagaimana problematika Pekerja Sosial Masyarakat dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan kebijakan dan implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Payakumbuh.
2. Menganalisis problematika Pekerja Sosial Masyarakat dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Antropologi Pembangunan atau dalam lain kata dapat dijadikan sebagai acuan karya ilmiah bagi rencana kajian studi tentang hubungan kebijakan serta kinerja mitra pemerintah seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan perilaku sehingga dapat merangsang munculnya penelitian-penelitian baru dalam fokus secara lebih mendalam dan maksimal. Dalam wilayah akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah kajian Antropologi.

Manfaat Praktis

Memberikan bacaan yang digunakan sebagai rujukan kepada masyarakat dan pemerintah yang tertarik dalam menerapkan realitas ilmu Antropologi utamanya dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik khususnya dibidang jaminan sosial. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan evaluasi instansi Dinas Sosial dalam implementasi kebijakan jaminan sosial. Kemudian penelitian ini juga diperuntukkan sebagai pemenuhan salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana Antropologi Sosial

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan sekiranya dapat memberikan *hasanah* wawasan peneliti dalam mendalami topik ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan Mirna Tri Pertiwi pada tahun 2020 yang berjudul Peran dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sudimara Jaya yang diterbitkan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini latar belakang karena keresahan penulis terhadap angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia dan penulis juga menuturkan pentingnya perlindungan sosial terkait situasi ini. Salah satu perlindungan sosial itu dapat berupa bantuan-bantuan sosial non tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan Data yang dipaparkan bahwa kelompok masyarakat yang berhak dalam menerima bantuan sosial tersebut adalah kelompok kurang mampu.

Banyaknya golongan yang kurang mampu dalam masyarakat, memicu pemerintah untuk membentuk mitra-mitra dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut. Salah satunya adalah Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM. Sehingga penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana peranan dan fungsi PSM dalam penyaluran BPNT.

Penelitian ini menemukan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kelurahan Sudimara Jaya telah mementaskan peranannya dengan baik yaitu sebagai penggerak dalam mengembangkan program pemerintah dalam bidang pangan yaitu melalui penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Secara fungsi juga Pekerja Sosial Masyarakat telah menjalankan fungsi motivator seperti sosialisasi setra penyebaran informasi penyaluran BPNT dan fungsi administrator seperti kesekretariatan verifikasi, pelaporan hingga validasi.

Berdasarkan penelitian Mirna Tri Pertiwi tersebut dapat ditarik bersamaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan dengan tema Pekerja Sosial Masyarakat dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara perbedaannya adalah penelitian Mirna lebih fokus kepada bagaimana seorang Pekerja Sosial Masyarakat menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di tengah masyarakat. Sementara, peneliti berfokus terhadap bagaimana peran dan perilaku yang dihasilkan dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penyaluran bantuan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nurmalita Sari yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Studi Di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka” Penelitian ini ditujukan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan BPNT

(Bantuan Pangan Non Tunai) di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaktepatan sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga adanya masalah pada keterlambatan turunnya saldo BPNT, harga pangan tidak menentu, jumlah *e-warong* yang tidak sesuai standar hingga terjadi *error* pada mesin pembayaran.

Penelitian ini menemukan bahwa penyebab dari ketidaktepatan sasaran dari program ini bukanlah dari kinerja PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan juga pihak-pihak yang berwenang. Karena pihak yang kelurahan sudah mengupayakan dengan maksimal agar seluruh masyarakat di Kelurahan Sungailiat yang terkendala perekonomian mendapatkan bantuan. Namun, keputusan tetap menjadi hak prerogritas dari Kementerian Sosial. Kemudian, permasalahan dalam sarana prasarana *e-warong* dan mesin pembayaran berusaha diatasi dengan memaksimalkan komunikasi para pemangku wewenang. Dengan bukti tersebut, dapat terlihat bahwa adanya usaha dari pemangku kebijakan sebagai *problem solver*.

Persamaan antara penelitian Aulia Nurmalita Sari dengan penelitian saya terletak pada salah satu fokus penelitian yakni mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan perbedaannya terdapat pada unit analisis dan metode penelitian. Penelitian ini mengambil unit analisis pada mahasiswa di Kota Malang dengan metode kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan unit analisis Mahasiswa Universitas Andalas dengan metode kualitatif.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati yang diterbitkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pola Perilaku Aparat Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Penelitian ini mengungkap bagaimana pola perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. aspek ini meliputi profesionalisme, kesetaraan, akuntabilitas, pengawasan, partisipasi, dan transparansi dalam pelaksanaan sebuah birokrasi. Ketidakmerataan dalam setiap aspek ini mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Indonesia. Dikhawatirkan kesenjangan ini akan menjadi permasalahan besar di tengah tengah kehidupan multikultural karena memandang latar belakang suku, budaya dan ras dalam memberikan pelayanan publik

Berdasarkan penelitian tersebut diungkap bahwa dasar dari adanya kesenjangan dalam pelayanan adalah masyarakat multietnik di dalam suatu daerah yang sama sudah pasti terdapat suatu etnik/kelompok yang mendominasi kelompok lainnya. Dalam hal ini tanpa disadari juga telah terdapat diskriminasi rasial. Sedangkan dalam sebuah birokrasi hendaknya terlaksana praktik yang tidak memihak dan bebas prasangka. Hal ini dapat diatasi jikalau aparat yang berwenang mampu menangani sebuah permasalahan secara objektif melalui kinerja yang berkualitas tinggi

Namun pada riset ini, permasalahannya keadaan sosial masyarakat yang multikultural ini tidak diimbangi dengan kinerja aparatur yang berkualitas tinggi. Justru terdapat banyak individu aparat yang memiliki kinerja rendah. Mereka cenderung melihat masyarakat yang membutuhkan bantuan bukan sebagai subjek

namun mereka memperlakukan layaknya objek. Sikap-sikap ini lahir dari kelemahan dasar dari Individu Aparatur tersebut. Lemahnya fondasi kompetensi, internalisasi etos dan nilai turut menciptakan lingkungan kerja yang bekerja lebih banyak berdasarkan perintah dibandingkan inisiatif diri sendiri sebagai motor penggerak suatu birokrasi.

Di samping itu turut juga berkontribusi dari aspek eksternal. Sistem pelaksana birokrasi yang tidak ideal menjadi suatu kelemahan yang mendasar pula. Dalam hal ini dapat dilihat melalui kurangnya pemantauan kinerja aparat secara berkala, kurangnya pengawasan birokrasi, kurangnya pengendalian sikap oleh supervisor, tidak adanya penilaian kinerja aparatur yang terukur hingga tidak adanya keterjaminan karir bahkan sering kali terjadi prosedur mutasi pegawai yang tidak transparan dalam pembagiannya.

Berdasarkan penelitian tersebut persamaan dengan rencana riset peneliti adalah dari segi aspek yang akan dikaji yakni perilaku dari pihak yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perilaku ini merupakan perilaku spontan yang dilakukan selama pihak yang berwenang tersebut menunaikan setiap tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) masing-masing. Sementara perbedaan yang terdapat dalam kedua penelitian ini adalah riset oleh Nurhayati adalah pada subjek dan unit penelitian. Nurhayati meneliti subjek aparatur kelurahan secara keseluruhan dan juga unit penelitiannya adalah pelayanan masyarakat secara general. Sementara, peneliti menarik subjeknya adalah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan juga unit penelitiannya terbatas pada proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sembi Novela yang berjudul Mekanisme Penetapan Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini memiliki kota lokasi penelitian yang sama dengan peneliti namun berbeda kecamatan dengan peneliti. Penelitian ini memiliki latar belakang banyaknya kendala-kendala dalam penyaluran BPNT di Kelurahan Sicincin seperti bantuan yang tidak diterima oleh KPM, terdapat perbedaan administratif dari pihak pusat dengan daerah dan yang terakhir keresahan terhadap telatnya memukhtahiran data-data dari calon penerima BPNT.

Penelitian ini menemukan terdapatnya faktor-faktor yang menjadi penghambat penentuan penerima BPNT. Aspek tersebut antara lain adalah kecilnya kuota, keadaan ekonomi yang merata, dan juga tidak adanya analisis kedalaman kemiskinan sebelum menentukan calon penerima BPNT. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sangat pentingnya bekerja sesuai SOP yang diberikan oleh kementerian sosial menghindari bias dan subjektifitas dalam penentuan calon KPM karena hubungan kekerabatan ataupun hubungan sosial yang cukup erat.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji problematika implementasi status kerelawanan mitra pemerintah diperlukan adanya pengetahuan mengenai kebijakan yang menyediakan posisi (status) seorang relawan yang akan diberdayakan. Menurut Binturo (1996:160) pendayagunaan sumber daya manusia dalam pemerintahan linear dengan tanggungan beban pemerintah dalam mengelola kebijakan pembangunan.

Posisi yang disediakan adalah bentuk adaptif dari harapan dan kebutuhan sebuah kebijakan. Secara antropologis, sebuah kebijakan dibentuk atas urgensi penyelesaian pada persoalan masyarakat. Salah satu persoalan yang sangat mudah dijumpai di Indonesia adalah persoalan kemiskinan.

Salah satu bentuk kebijakan pengentasan kemiskinan yang diusung pemerintah adalah Bantuan Pangan Non Tunai, yang disingkat BPNT. BPNT merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai berupa uang elektronik dari pemerintah kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara rutin dalam satu hingga tiga bulan sekali. Bantuan ini hanya dapat digunakan oleh KPM untuk membeli bahan pangan di *e-Warong*. *E-Warong* merupakan Elektronik Warung Gotong Royong yang ditentukan oleh Pemerintah sebagai agen pembelian bahan-bahan pangan yang diperuntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana telah bermitra dengan bank penyalur. Program bantuan sosial pangan merupakan bentuk pengembangan dari program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) yang kemudian pada tahun 2017 bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini diberikan dalam wujud saldo yang didapat oleh masyarakat penerima manfaat, yang dicairkan satu kali dalam satu hingga tiga bulan dengan besarnya yaitu Rp 200.000/KPM. Saldo hanya dapat ditukar berupa barang sembako yang mana dapat diambil melalui pedagang yang memiliki *e-Warong* terdekat yang telah terdaftar dengan instansi terkait.

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi 25% terendah di wilayah tersebut yang tercakup dalam DT-PPFM yang merupakan kepanjangan dari Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin (Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017). Pemerintah daerah yang di dalamnya tercakup pemerintah provinsi, kota hingga kabupaten memiliki kewenangan untuk menambah kuota penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kuota tambahan tersebut didasarkan kepada keluarga yang memiliki kualifikasi perekonomian rentan dalam suatu wilayah namun tidak terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) Kuota ini memiliki dependensi terhadap anggaran APBD suatu wilayah yang diperuntukkan kepada program bantuan sosial. Hal ini didasarkan kepada penyesuaian kuota dengan kapasitas keuangan daerah setelah memprioritaskan belanja wajib dan pilihan pemerintahan kecuali, telah diatur secara terstruktur di dalam peraturan perundang-undangan. (Sasmita, 2022:18)

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Bantuan Pangan Non Tunai diterangkan bahwa Bab 1 Pasal 2 (1), Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam rangka pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; dengan upaya menyediakan pangan penunjang gizi yang seimbang kepada KPM; meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; serta memberikan opsi dan kontrol penuh kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan kalori sehari hari

KPM menerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras, gula, tahu, kentang, daging sapi, daging ayam dan telur setiap satu hingga tiga bulan sekali. Dengan biaya sebesar Rp 200.000 yang telah disalurkan melalui rekening masing-masing KPM dan menukarkannya ke *e-warong* atau bank yang

telah bermitra dengan pemerintah dalam melaksanakan proses penyalurannya. Bantuan ini tidak bisa ditukar dengan uang, hanya dengan sembako saja. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan modernisasi sistem penyaluran bantuan pangan dengan bentuk *cashless* yakni menggunakan kartu elektronik milik KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan sistem perbankan dengan saldo.

Dalam mengkaji jalannya sebuah kebijakan tentunya tak luput dari peranan mitra dalam implementasi sebuah kebijakan. Salah satu mitra penggerak kebijakan adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial dan memiliki peran tertentu. Peran merupakan sebuah aspek dinamis yang linear dengan kedudukan (status) seseorang dalam hal menjalankan hak dan kewajibannya maka akan terbentuk suatu peran (Soekanto, 2002:243). Status yang dimiliki oleh PSM adalah sebagai mitra pemerintah yang bekerja secara sukarela yang bermodalkan jiwa sosial yang tinggi mengabdikan untuk masyarakat (PERMENSOS, 2019). Berkedudukan di desa/kelurahan dalam setiap daerah karena mengingat bahwa PSM tumbuh di daerah tersebut bersama masyarakat setempat karena dinilai sangat memahami karakteristik masyarakatnya (Akbar, 2017:33). Dengan adanya dasar keterikatan dengan masyarakat, lahirlah harapan sosial dari masyarakat yang menjadi prospek bantuan yang dinamakan *significant others*.

Menurut Ahmadi (2009:106) kompleks pengharapan manusia dalam bersikap sesuai status dan fungsi sosial merupakan aspek krusial dari sebuah peran. Dalam teori peran (*role theory*) menekankan bahwa sifat individual sebagai pelaku sosial diwujudkan dalam perilaku menyesuaikan dengan posisi yang ditempatinya

dalam ranah lingkungan kerja maupun masyarakat (Anisykurlillah dkk, 2013:110). Dalam menjalankan peran sebagai PSM terdapat aksi yang merujuk pada aktivitas, kreativitas dan penghayatan individu dalam mementaskan perannya. Oleh karena itu menurut Talcott Parsons (1937) aksi bukanlah termasuk aliran Behaviorisme. Dalam teori aksi sangat berperan penting sarana prasarana dalam ranah abstrak seorang aktor karena merupakan komponen yang memengaruhi tindakan/langkah yang dihasilkan atas kondisi situasional yang dialami seorang aktor sehingga dapat memengaruhi cara atau alat alternatif yang digunakan oleh aktor dalam mencapai suatu tujuan (Ritzer, 2014:49). Kondisi situasional dalam konteks penelitian ini dapat diambil dari sisi perekonomian dan sisi kebudayaan yang berkembang dalam lingkungan kehidupan seorang PSM yang menjadi problematika dalam memerankan sebuah statusnya. Problematika merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan (Muhith, 2018:46) Penyelesaian ini dipengaruhi oleh prasarana dapat dipahami sebagai ranah abstrak yang memengaruhi seorang aktor.

Sesuatu yang abstrak tersebut dapat berwujud dalam *the state of mind, spirit, meaning, ethos, value, the capability of mind, belief* dan sejenisnya. Dalam membangun sebuah *ideational* yang bersifat abstrak, dapat diperoleh melalui proses belajar yang nantinya hasil belajar ini digunakan oleh individu tersebut sebagai landasan dalam menginterpretasikan sesuatu yang terdapat di sekelilingnya dan juga mampu menghasilkan strategi-strategi dalam menghadapi segala bentuk kondisi dalam kehidupan mereka (Spreadley, 2006). Oleh karena itu, kebudayaan

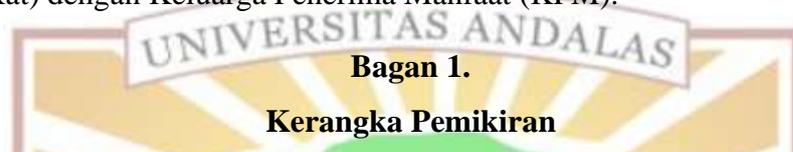
dalam ranah *ideational* difungsikan sebagai pembentuk pola perilaku yang khas dalam masyarakat (Marzali, 2005:52).

Dalam ranah abstrak terdapat konsepsi nilai atau *value* dapat membentuk orientasi seseorang. *Value-oriented* dimanifestasikan dalam ucapan, perilaku, dan materi. Nilai-nilai dapat mempengaruhi perilaku manusia yang berhubungan dengan alam atau manusia lainnya (Kluckhohn dalam Marzali : 2005:112). *Value-oriented* dapat dikorek dengan mencari nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat tersebut. Sesuatu yang berharga tersebut terdapat dalam dimensi kultural yang sangat dipengaruhi oleh kondisi struktur sosialnya dan sangat erat kaitan antara keduanya (Parsons dalam Marzali, 2005:79)

Struktur sosial sebagai faktor sosial yang dipertimbangkan dapat meliputi hubungan sosial antar individu, hubungan antar kelompok-kelompok, hubungan antar kelas, hubungan antar golongan hingga hubungan antar sektor kehidupan (Marzali, 2005:77). Secara struktural dapat menjadi sorotan sebuah hubungan antar suatu pihak dengan pihak lainnya yang berdampak pada dominasi politik-administratif. Pola hubungan tersebut dapat dilihat dari hubungan antara Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi tanggung jawab tugasnya.

Korelasi hubungan struktural di antara keduanya memiliki kedudukan dan juga fungsi masing-masing. Menurut teori tindakan oleh Max Weber (1968:4) individu bertindak dengan subjektif berorientasi pada orang lain dengan mempertimbangkan orang lain. Tindakan ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan-hubungan sosial yang stabil sehingga terciptalah perilaku-perilaku aktor-

aktor tersebut yang dipengaruhi, dibentuk dan dicetak oleh kultur (Marzali, 2005:80). Jadi dalam hal ini, terdapat hubungan dialektik yang saling mempengaruhi antara kultural dengan sosial. Dapat berbentuk struktur yang beradaptasi terhadap kultur ataupun membentuk kultur baru dalam mempertahankan stabilitas hubungan yang mapan antara PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



Sumber : Data Primer, 2023

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang didasarkan kepada standar prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berdasarkan ujaran atau catatan orang itu sendiri, perilaku mereka yang

menjadi objek observasi, pendekatan ini mengarah kepada situasi atau kondisi dan individu-individu yang digambarkan secara holistik atau menyeluruh (Bodgan dan Taylor, 1993:30).

Kemudian, menurut Afrizal, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian dari ilmu sosial yang mencari dan mengumpulkan data dan kemudian menganalisis data tersebut dalam bentuk kata-kata (lisan ataupun tulisan) serta peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menghitung dan mengubahnya dalam bentuk angka-angka. (Afrizal, 2014: 13). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan secara rinci terkait sifat-sifat suatu individu, situasi, fenomena atas kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya korelasi tertentu antara suatu komponen fenomena dengan fenomena lainnya dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1997:29).

Peneliti memilih pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian karena jenis data yang peneliti kumpulkan dan analisis data yang dilakukan. Di mana pada pendekatan kualitatif jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data kata-kata serta perbuatan dari manusia atau kelompok (Afrizal, 2014 :15). Data yang akan peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa perilaku-perilaku perilaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dapat menciptakan peran dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data yang dikumpulkan dapat berupa lisan yaitu percakapan ataupun aktivitas-aktivitas terjadi di tengah subjek

yang diteliti, tulisan yaitu berupa naskah-naskah yang mendukung seperti peraturan konstitusional ataupun subjek yang ingin diteliti.

Pendekatan kualitatif juga dapat difungsikan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedang terjadi dan pendekatan ini dapat menjadi pengetahuan mengenai sesuatu yang dewasa ini hanya sedikit diketahui serta dengan pendekatan ini dapat memberikan rincian yang kompleks mengenai fenomena yang sulit diungkap dan dianalisis oleh metode penelitian kuantitatif (Strauss & Corbin, 2007: 5). Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif peneliti dapat menguraikan serta mendeskripsikan pertanyaan penelitian serta menjawab pertanyaan tersebut dengan detail dan terperinci serta diharapkan agar pembaca dapat membayangkan secara langsung atas deskripsi yang diuraikan.

Sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Creswell dalam bukunya yang bertajuk "*Qualitative Inquiry And Research Design*" mengemukakan beberapa karakteristik pendekatan suatu studi kasus yaitu;

- a. Mengidentifikasi sebuah "kasus" dengan dasar suatu studi. Peneliti mengangkat kasus Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam proses implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Payakumbuh.
- b. Kasus tersebut merupakan sebuah "sistem yang terikat" baik oleh waktu maupun tempat. Pekerja Sosial Masyarakat memiliki wilayah wewenang dan periodenya masing-masing sehingga topik penelitian ini sangat bersifat situasional secara tempat maupun waktu

- c. Menggunakan gambaran secara terperinci dan mendalam tentang respons aktor terhadap suatu peristiwa; Peristiwa yang menjadi subjek kajian adalah proses kontribusi pekerja sosial masyarakat dalam merespons kekurangan pangan yang dialami oleh kerabatnya
- d. Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti lebih banyak mengungkapkan bagaimana konteks atau *setting* untuk suatu kasus karena setting situasi sangat penting menjadi alasan mendasar yang memicu tindakan dari seorang kerabat misalnya kondisi ekonomi kerabatnya.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh dengan memilih dua kelurahan yaitu; Kelurahan Parit Rintang dan Kelurahan Koto Baru. Pemilihan beberapa kelurahan didasarkan kepada terdapatnya pola perilaku PSM yang berbeda dan ekstrim pada dua kelurahan tersebut dari 47 kelurahan di Kota Payakumbuh.

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai ini dipilih karena terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait kinerja PSM setempat dan juga implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seringkali tidak sesuai dengan alur dan ketentuan. Keluhan ini disampaikan kepada peneliti ketika melaksanakan magang Sedangkan Kelurahan Parit Rintang dipilih karena memiliki prestasi sebagai PSM terbaik se-Kota Payakumbuh (dilansir dari website beritapayakumbuh.go.id) dan terbaik kedua se-Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melalui pemilihan pilar-pilar berprestasi.

3. Matriks Data

Diperkirakan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Matriks Data Penelitian

No.	Tujuan Penelitian	Pertanyaan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimana kebijakan dan implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Payakumbuh ?	<p>Apa landasan yang mendasari kebijakan BPNT ?</p> <p>Apa landasan yang mendasari pembentukan PSM ?</p> <p>Apa saja tugas pokok dan fungsi PSM dalam penyelenggaraan BPNT ?</p> <p>Bagaimana implementasi BPNT di Kota Payakumbuh ?</p>	<p>Dokumen Konstitusional</p> <p>Dokumen Konstitusional</p> <p>Dokumen Pedoman Pekerja Sosial Masyarakat</p> <p>Dinas Sosial, Pendamping BPNT tingkat kota, KPM, Lurah</p>	<p>Wawancara, Observasi, Observasi Partisipatif, Studi Dokumentasi</p>
2.	Bagaimana perilaku Pekerja Sosial Masyarakat dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Payakumbuh ?	<p>Bagaimana latar belakang PSM ? (Tingkat pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, kekerabatan, ketaatan beragama, <i>value</i>, dll)</p> <p>Bagaimana perilaku PSM dalam verifikasi dan validasi data ?</p>	<p>PSM</p>	<p>Wawancara, Observasi, Observasi Partisipatif</p>

	<p>Bagaimana perilaku PSM dalam mengkomunikasikan informasi BPNT ?</p> <p>Bagaimana perilaku PSM dalam pendampingan graduasi KPM BPNT ?</p> <p>Bagaimana problematika PSM dalam kegiatan pendampingan BPNT</p>	<p>Dinas Sosial, Pendamping BPNT tingkat kota, KPM, Lurah</p> <p>Dinas Sosial, Pendamping BPNT tingkat kota, KPM, Lurah</p> <p>Dinas Sosial, Pendamping BPNT tingkat kota, KPM, Lurah</p>
--	--	---

Sumber: : Data Primer, 2023

4. Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014:139) terdapat dua kategori informan yang berperan penting dalam penelitian sehingga harus ditemukan di lapangan yakni, informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat merupakan informan dikategorikan sebagai seseorang yang dapat memberikan informasi tepat mengenai tentang sesuatu kejadian, tentang tindakan orang lain ataupun hal lainnya yang diperlukan sebagai data penelitian. Kemudian, Informan pelaku merupakan informan yang dapat dikategorikan sebagai sumber informasi dan keterangan mengenai data yang terkait dengan dirinya, perilaku dan tindakannya, pemikiran dan pengetahuannya, interpretasinya (makna) yang diberikannya. Informan pelaku merupakan subjek dari penelitian itu sendiri.

a) Informan Pelaku

Informan penelitian yang peneliti pilih dalam kategori informan pelaku adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Peneliti memilih PSM karena merupakan subjek yang sangat berpengaruh dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat banyak keluhan-keluhan masyarakat terkait kinerja dan juga sikap subjektivitas dari seorang PSM dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

b) Informan Pengamat

Kategori Informan pengamat yang peneliti pilih adalah para KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Masyarakat serta rekan kerja PSM tersebut. KPM dipilih sebagai informan pengamat karena KPM berinteraksi secara langsung dengan PSM dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian, rekan kerja PSM seperti sesama PSM lainnya juga diambil menjadi informan pengamat karena memiliki pengalaman interaksi dan juga mengetahui tahapan pengambilan keputusan oleh PSM tersebut.

Tabel 2.
Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Pendidikan	Posisi/Jabatan	Penerima Bantuan
1.	Irwan Suwandi	41 tahun	Strata I	Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-
2.	Emylia Nora	46 tahun	Strata I	Sub koordinator Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan Dinas Sosial	-
3.	Ms	52 tahun	SLTA	PSM	BPNT

4.	Ay	49 tahun	Diploma III	PSM	BPNT
5.	Iw	59 tahun	SLT	PSM, Ketua RT	BPNT
6.	Ln	53 tahun	Strata I	PSM, Ketua RW	BPNT
7.	Md	53 tahun	SMEA	PSM	PKH dan BPNT
8.	Is	36 tahun	SLTA	PSM	BPNT
9.	Fg	43 tahun	Diploma III	PSM,	-
10.	Ly	41 tahun	SLTA	KPM	PKH dan BPNT
11.	Er	47 tahun	SLTA	KPM	PKH dan BPNT
12.	Gs	37 tahun	SLTA	KPM	BPNT
13.	Ft	45 tahun	SD	Masyarakat	BPNT

Sumber: : Data Primer, 2023

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, mengingat ada dua jenis data yang harus dikumpulkan. Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2018 :104) bahwa sumber data terbagi menjadi dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang bersifat langsung dapat memberikan data kepada peneliti yang dapat diperoleh melalui penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan serta informasi-informasi yang diberikan oleh informan. Kemudian data Sekunder merupakan sumber data yang didapat kategorikan sebagai data yang tidak secara langsung berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dapat termuat dalam dokumen-dokumen, naskah-naskah yang didapatkan dari studi pustaka dan literatur.

a) Observasi Partisipasi

Teknik penarikan data melalui observasi merupakan teknik tertua dalam sejarah penelitian. Observasi adalah mengamati objek secara langsung mengandalkan panca indra dari penulis yang bertindak sebagai observer yang di mana peneliti menyaksikan langsung aktivitas, lingkungan secara visual dan fisik, interaksi, partisipan, percakapan hingga perilaku oleh peneliti sendiri selama proses pengamatan tersebut. Dapat juga dilakukan dengan mendengar sekaligus memahami perilaku yang benar-benar terjadi sehingga kebenaran dari data-data tersebut dapat teruji (Creswell, 2015:231). Pengamatan dilakukan terhadap unsur-unsur verbal maupun non verbal yang akan direkap dalam catatan atau *logbook* secara komprehensif dan mendetail

Observasi partisipasi saat penelitian di lapangan bertujuan untuk mengamati fenomena-fenomena yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari pada kelompok masyarakat ataupun individu yang menjadi objek penelitian. Dengan mengaplikasikan metode observasi partisipasi ini seorang peneliti dapat berpedoman pada kategori dan tingkat gejala yang harus diamati menurut matriks data yang telah disusun oleh peneliti sehingga didapatkan data yang lengkap dan relevan dengan gejala-gejala (tindakan, benda, peristiwa) dan memiliki korelasi antara setiap komponennya sehingga dapat ditelusuri makna bagi kehidupan masyarakat yang ditelitinya (Bungin, 2004: 49). Adapun data yang dicari menggunakan teknik ini adalah perilaku PSM dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan menggunakan observasi partisipatif dapat terlihat secara

langsung oleh peneliti bagaimana sikap-sikap PSM dalam proses implementasi kebijakan.

b) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan langkah memperoleh keterangan dari informan secara verbal. Wawancara merupakan langkah memperoleh keterangan dari informan secara verbal. Pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung secara *face to face* tanpa perantara. Wawancara mendalam merupakan tipikal wawancara tidak berstruktur yang dilontarkan oleh pewawancara kepada informan sehingga dapat berbentuk sebuah interaksi sosial tanpa disengaja antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi secara tidak terstruktur maka peneliti dapat menggali secara mendalam hal-hal yang menjadi faktor-faktor gejala sehingga memudahkan peneliti mengungkap fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Wawancara ini tergolong sebagai penunjang utama dari metode observasi, karena dengan wawancara kita dapat menghasilkan data yang tidak dapat dicatat/diterjemahkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti (Kontjaraningrat, 1997:61).

c) Studi Dokumentasi

Studi Dokumen merupakan teknik perolehan informasi dari arsip, catatan, gambar dan karya artefak yang berhubungan dengan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2013) studi dokumentasi digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi data observasi dan juga data wawancara. Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan dalam rangka melengkapi informasi berupa arsip pihak

berwajib mengenai data penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Data Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Payakumbuh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna sebagai bentuk kajian dari temuan-temuan lapangan yang nantinya memiliki *output* hasil penelitian berupa kesimpulan akhir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdapat 3 tahapan sebagai berikut;

Pertama, reduksi data menurut Miles dan Huberman (dalam Salim dan Syahrur, 2012:148) meliputi proses penyeleksian, pemfokusan, pengabstraksian serta penyederhanaan data dari catatan lapangan dan hasil wawancara yang masih bersifat mentah berupa hasil rekaman, tulisan tangan dan dokumen arsip yang akan dilakukan transfer data menjadi data tertulis yang lebih sistematis.

Kedua, penyajian data (*display data*) yang dapat ditampilkan dengan teks naratif, grafik, diagram, bagan maupun tabel yang merupakan kesatuan data terpadu. *Terakhir*, penarikan kesimpulan (verifikasi) yang bertumpu pada kemampuan *brainstorming* dari penulis sendiri yang akan menghasilkan konklusi yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data serta analisisnya.

7. Proses Jalannya Penelitian

Proses penelitian mulai dilaksanakan oleh peneliti seminggu setelah seminar proposal yang diadakan pada tanggal 24 Maret. Pada tanggal 29 Maret 2023 peneliti menerima surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Setelah surat tersebut dikeluarkan,

peneliti menyusun rencana surat tebusan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Surat izin yang diberikan oleh Fakultas menjadi pengantar perizinan penelitian yang akan diajukan pada Mal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Payakumbuh pada tanggal 17 April 2023. Surat ini menjadi dokumen penting peneliti dalam hal perizinan dengan tebusan ke Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kantor Camat Payakumbuh Barat, Kantor Camat Payakumbuh Utara, Kantor Lurah Kapalo Koto Dibalai, Kantor Lurah Parit Rantang dan juga Koordinator Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Payakumbuh.

Setelah mendapatkan surat izin penelitian, peneliti mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh untuk mendapatkan perizinan dari Kepala Dinas Sosial sebagai bentuk pengantar izin kepada Bidang PRJS (Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial) yang menaungi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bidang PRJS membantu peneliti untuk memperoleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penjadwalan Musyawarah Kelurahan (muskel) serta peranan PSM sebagai *problem solver* dari hambatan yang terdapat dalam proses implementasi dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bidang PRJS juga membantu saya untuk menghubungi sub koordinator yang menaungi PSM Kota Payakumbuh.

Pada tanggal 26 April, peneliti mengunjungi Kantor Lurah Kapalo Koto Dibalai untuk meminta perizinan untuk melaksanakan penelitian lapangan serta

meminta data-data penting seputar lokasi penelitian meliputi; data kependudukan, data perekonomian, perangkat kelurahan hingga kontak dari PSM yang bertugas diwilayah tersebut yang dianggap perlu sebagai informan pelaku dalam rencana penelitian ini. Namun, kantor tidak memiliki peta kelurahan dalam bentuk *softcopy* sehingga di hari yang sama saya mengunjungi Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kota Payakumbuh untuk meminta peta administratif dari kelurahan yang akan saya teliti yakni; Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan Kelurahan Parit Rantang.

Keesokan harinya bertepatan dengan tanggal 28 April, peneliti mengunjungi kantor Lurah Parit Rantang untuk meminta perizinan dan juga meminta data-data lokasi penelitian dimulai dari data perangkat, visi misi, kependudukan hingga perekonomian sebagai penunjang data profil lokasi penelitian. Saya dibantu oleh perangkat lurah yang bertugas dan juga pihak kelurahan memberikan saya kontak dari PSM Parit Rantang yang diperlukan sebagai informan dalam penelitian ini.

Pada tanggal 28 Mei 2023 peneliti Kembali mengunjungi Dinas Sosial kota Payakumbuh untuk menemui Sub koordinator Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan Dinas Sosial, Ibu Emylia Nora. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan Ibu Nora selaku subkoordinator dari bidang yang menaungi Pekerja Sosial Masyarakat. pertanyaan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan teknis Pekerja Sosial Masyarakat di lapangan. Pada pertemuan ini penulis juga diperlihatkan berkas-berkas penting seperti SK global

dari seluruh PSM Kota Payakumbuh dan juga berkas penandatanganan serah terima uang transportasi untuk PSM.

Dalam kurun waktu 2 minggu kemudian peneliti mengunjungi masing-masing PSM, KPM, pihak kelurahan dari setiap kelurahan untuk melakukan wawancara. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dalam penyaluran BPNT di Kota Payakumbuh. Peneliti juga melakukan observasi dari kegiatan PSM pada kelurahan masing-masing. Data data tersebut diperlukan untuk memperoleh data data mengenai latar belakang PSM, kinerja PSM dan lika liku yang dihadapi oleh PSM sebagai relawan sosial pada saat penyaluran BPNT di tengah tengah masyarakat. selanjutnya peneliti akan melakukan reduksi dan analisis data sesuai yang ditemukan dilapangan.

